



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Alamat : Jalan A. Yani KM. 4,5 No. 03 Kel. Batu Piring  
Kecamatan Paringin Selatan Kode Pos 71462 Telp. (0526) 2094094

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 188.45/143 /SK/DSPPPAPMD/2021**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK)**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK SERTA**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK);
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BALANGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021-2026



- KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dan lebih bersifat impact dan/atau minimal outcome
- KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan bersifat outcome dan/atau output yang berkualitas
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin  
Pada tanggal : September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**Drs. URAI NUR ISKANDAR, MM**  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP. 19730501 199311 1 001

**RUMUSAN INDIKATOR KINERJA  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026**

**A. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Makna Indikator	Alasan Memilih Indikator	Formulasi Perhitungan/Rumus	Sumber/Referensi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan 1 : Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	Mengindikasikan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	indikator ini untuk mengetahui jumlah PPKS yang tertangani pada tahun bersangkutan	Jumlah PPKS yang tertangani / Jumlah total PPKS x 100%	PMDN 86 / 2017	Urusan Sosial	Kepala Dinas
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)							Kepala Dinas
3	Tujuan 2 : Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks pembangunan gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki-laki sama dengan IPM perempuan	IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.	$IPG : 1/3[Xede(1) + Xede(2) + Linc - Dist]$	PMDN 17 / 2021	Bidang PPPA	Kepala Dinas
4	Sasaran 1: Meningkatnya Kesetaraan Gender	IDG (indeks Pemberdayaan Gender)	IDG merupakan indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik	Indikator ini menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan dilihat dari partisipasi dibidang ekonomi dan politik.	$IDG : 1/3 (Ipar + IDM + lin - Dist)$	PMDN 17 / 2021	Bidang PPPA	Kepala Dinas
		Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja langsung APBD)	SKPD yang menyusun anggaran responsif gender (ARG) dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga dengan melakukan PPRG untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan gender (KKG)	Tersusunnya anggaran yang responsif gender pada belanja langsung SKPD dapat meningkatkan indikator IPG	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	PMDN 18 / 2020 dan PMDN 17 / 2021	Bidang PPPA	Kepala Dinas

5	Sasaran 2 : Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	Indikator ini menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Balangan	(Jumlah Korban Perempuan) / (jumlah perempuan 18 Th ke atas) x (100.000)	PMDN 18 / 2020	Bidang PPPA	Kepala Dinas
		Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (sesuai pasal 1 UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak)	Indikator ini menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Balangan	(jumlah korban anak) / (jumlah anak usia di bawah 18 th) x 10.000	PMDN 18 / 2020	Bidang PPPA	Kepala Dinas
6	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa dengan klasifikasi minimal maju	Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomidan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.	Tipologi Desa berdasarkan IDM terbagi menjadi 5 klasifikasi, posisi saat ini Desa sebagian besar masih pada klasifikasi tertinggal dan sangat tertinggal. Sehingga hal ini yang akan didorong untuk meningkatkan klasifikasi minimal desa maju	x dibagi y dikali 100 %  Ket : x : Jumlah desa minimal maju tahun berjalan y : Jumlah desa di Kabupaten Balangan	ANALISIS MANDIRI	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas
7	Sasaran 3 : Meningkatnya klasifikasi desa							Kepala Dinas

A. PROGRAM

No.	Program	Indikator Kinerja	Makna Indikator	Alasan Memilih Indikator	Formulasi Perhitungan/Rumus	Sumber/Referensi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<b>Makna Indikator</b> : Mengindikasikan jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial <b>Kriteria Berkualifikasi Terampil</b> : (1). Berdasarkan hasil pre test dan post test terdapat peningkatan, (2). Dapat melakukan intervensi sosial, (3). Dapat membuat administrasi pelayanan	Semakin besar persentase Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil, maka semakin baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil dibagi Jumlah Pupulasi PSKS di Kab. Balangan dikali 100 %	Analisis mandiri	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Kabid Permbdayaan dan Rehabilitasi Sosial

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Semakin besar persentase jumlah PPKS yang dibantu dan mampu berfungsi sosial kembali, maka hal tersebut berkontribusi menurunkan jumlah PPKS	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dibagi Jumlah total PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi)x 100%	Analisis mandiri	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Kabid Permbudayaan dan Rehabilitasi Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial sesuai tingkat kepentingan/keperluannya (yang dibutuhkan)	Semakin besar persentase jumlah fakir miskin yang dibantu dan mampu berfungsi sosial kembali, maka hal tersebut berkontribusi menurunkan jumlah PPKS	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu : Jumlah fakir miskin seluruhnya x 100%	Data BDTKS		Kabid Perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan bencana
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Seluruh korban bencana baik alam maupun sosial dalam hal kebutuhan pokok atau orgen dilokasi	korban bencana alam adalah prioritas dalam masa tanggap darurat	Korban bencana : jumlah seluruh korban bencana	Data dilapangan	Kader sosial/ Anggota tagana	Kabid Perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan bencana
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	Mengindikasikan jumlah makam pahlawan yang terawat	Teridentifikasi jumlah makam pahlawan yang terawat	Jumlah makam pahlawan yang terawat	Analisis mandiri	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Kabid Permbudayaan dan Rehabilitasi Sosial
	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	SKPD yang menyusun anggaran responsif gender (ARG) dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga dengan melakukan PPRG untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan gender (KKG)	Tersusunnya anggaran yang responsif gender pada belanja langsung SKPD dapat meningkatkan indikator IPG	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	PMDN 18 / 2020 dan PMDN 17 /2021		Kabid PPPA
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks pembangunan gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki-laki sama dengan IPM perempuan	IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.	IPG : 1/3[Xede(1) + Xede(2) + Linc - Dist]	PMDN 17 / 2021		Kabid PPPA
		IPG ( Indeks Pembangunan gender)	IDG merupakan indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik	Indikator ini menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan dilihat dari partisipasi dibidang ekonomi dan politik.	IDG : 1/3 (Ipar + IDM + lin - Dist)	PMDN 17 / 2021		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah seluruh kasus kekerasan yang melapor dan mendapatkan layanan sesuai kebutuhan korban	Untuk mengetahui jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif	Jumlah Seluruh Kasus yang ditangani oleh dalam 1 tahun	analisis mandiri		Kabid PPPA
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	untuk mengetahui pengurangan jumlah perkawinan anak ditingkat daerah. Pernikahan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 tahun.	menekan terjadinya perkawinan usia anak, indikator ini menggambarkan seberapa besar persentase terjadinya perkawinan usia anak di daerah	Perbandingan jumlah perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun dibagi jumlah seluruh perempuan umur 20-24 tahun dikali 100%	UU No 35/2014 tentang perlindungan anak dan UU No 16/2019 tentang batas minimal usia perkawinan	Bidang PPPA	Kabid PPPA

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	lembaga yang berkontribusi terhadap penyusunan data gender dan anak. Data Gender dan anak adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki, perempuan dan anak	indikator ini menggambarkan seberapa besar peran serta lembaga yang berkontribusi terhadap ketersediaan data gender dan anak	Perbandingan Jumlah lembaga yang berkontribusi pada penyusunan data gender dan anak dibagi jumlah seluruh lembaga yang menjadi anggota tim penyusunan data terdapat gender dan anak dikali 100%	Permen PPPA No 6/2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	IPA merupakan presentasi dari capaian pembangunan perlindungan anak Indonesia yang memuat Kluster I-V, IPHA memuat Kluster I-IV dan IPKA memuat Kluster V. IPA merupakan gabungan dari IPHA dan IPKA.	IPA merupakan Salah satu arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: perwujudan Indonesia Layak Anak dengan penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati hak-haknya.	ada 31 indikator kandidat IPA-IPHA-IPKA yang bersumber dari survei BPS dan survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang merupakan kerjasama antara BPS dan Kementerian Kesehatan. Sumber data dari survei BPS adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran (KP), Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).	analisis data dari BPS	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	Jumlah seluruh kasus kekerasan yang melapor dan mendapatkan layanan sesuai kebutuhan korban	Untuk mengetahui jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara komprehensif	Jumlah Seluruh Kasus yang ditangani oleh dalam 1 tahun	analisis mandiri	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang di buat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, kerjasama desa menjadi bagian dari upaya meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa	Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat	Jumlah desa yang melakukan kerjasama di bagi jumlah desa SeKabupaten Balangan	Permendagri Nomor 96 Tahun 2017	rapat dan monitoring evaluasi	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	APBDes merupakan dokumen rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa	Indikator ini menggambarkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	=Jumlah Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu/Jumlah Desa x 100%	1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 2. Perbup Balangan Nomor 48 Tahun 2018	Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa	Kabid Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMVAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	BUMDES aktif adalah Bumdes yang memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan tertata serta menghasilkan PAD	Agar dapat di ukur tingkat keberhasilan terhadap pembinaan BUMDES	BUMDES aktif dibagi Bumdes yang di bina x 100%			Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa

B. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No.	Program	Indikator Kinerja	Makna Indikator	Alasan Memilih Indikator	Formulasi Perhitungan/Rumus	Sumber/Referensi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
-----	---------	-------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>								
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan sosial	<b>Makna Indikator</b> : Mengindikasikan jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial <b>Kriteria Berkualifikasi Terampil</b> : (1). Berdasarkan hasil pre test dan post test terdapat peningkatan, (2). Dapat melakukan intervensi sosial, (3). Dapat membuat administrasi pelayanan	Semakin besar persentase Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil, maka semakin baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil dibagi Jumlah Pupulasi PSKS di Kab. Balangan dikali 100 %	Analisis mandiri	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Kabid Perbedayaan dan Rehabilitasi Sosial
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	Mengindikasikan Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	Semakin Banyaknya Lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial maka semakin meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan	Analisis mandiri	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Sosial	Kasi Pemberdayaan Sosial
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan						
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang ( PUB ) yang direkomendasikan						
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan						
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) yang terampil						
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) yang terampil	Membina Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) sehingga terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Semakin Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) dibina maka akan terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah TKSK yang terampil	Analisis mandiri	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Sosial	Kasi Pemberdayaan Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	semakin sedikit jumlah penerima BPNT. Maka angka kemiskinan menurun	Jumlah Pnerima BPNT	Analisis Mandiri	Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten	Kasi Jaminan Sosial
		Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	Semakin banyak KPM PKH yang sudah digraduasi, maka dapat menekan jumlah PPKS pada keluarga miskin	jumlah KPM PKH yang digraduasi	Analisis Mandiri	Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten serta HIMBARA	Kasi Jaminan Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	Mendampingi dan membina Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sehingga terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Semakin banyak jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diberi pendampingan dan pembinaan akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah PPKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh pendampingan dan pembinaan	Analisis mandiri	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Pendampingan dan Supervisi	Kasi Pendampingan dan Supervisi
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>								



	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Terlayannya Penyandang Disabilitas terlantar dan lansia terlantar	tercukupinya kebutuhan dasar permakanan bagi Penyandang Disabilitas terlantar dan Lansia	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di	PERMENSOS No.9 Tahun 2018	Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI	PPTK, KPA & Pengguna Anggaran
	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan sandang						
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sesuai dengan PERMENSOS No.9 Tahun 2018	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di bagi Jumlah Penyandang	PERMENSOS No.9 Tahun 2018	Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI	PPTK, KPA & Pengguna Anggaran
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	Dapat memberikan keterampilan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial	Sesuai dengan PERMENSOS No.9 Tahun 2020	Persentase (%) = Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di bagi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kali 100%	PERMENSOS No.9 Tahun 2018	Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI	PPTK, KPA & Pengguna Anggaran
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	Terlayannya Orang terlantar untuk dikembalikan ke keluarganya	Sesuai dengan PERMENSOS No.9 Tahun 2019	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di	PERMENSOS No.9 Tahun 2018	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di	PPTK, KPA & Pengguna Anggaran
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sesuai dengan PERMENSOS No.9 Tahun 2019	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di	PERMENSOS No.9 Tahun 2018	Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI	PPTK, KPA & Pengguna Anggaran
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan						
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan data dan pengaduan yang dimiliki						
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang dilayani						
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah peralatan dan bahan tes urine yang disediakan						
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang terlantar yang dilayani						
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>								
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	Tidak semua fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial sesuai tingkat kepentingan/keperluannya (yang dibutuhkan)	keterbatasan anggaran dan keterbatasan tenaga/ petugas sosial	Jumlah Keperluan : Jumlah fakir miskin x 100%	Data BDTKS		Kabid Perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan bencana
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang di Validasi	Mengindikasikan jumlah keluarga miskin yang tervalidasi setelah verifikasi	Semakin banyak jumlah fakir miskin yang divalidasi maka akan didapat data fakir miskin yang valid	Jumlah fakir miskin yang divalidasi			Kasi Perlindungan Sosial
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	Mengidentifikasi jumlah PPKS yang keluar dari garis kemiskinan setelah diberikan bantuan sosial	semakin banyak PPKS yang diberikan bantuan sosial, maka dapat mengurangi jumlah PPKS yang ada di Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang keluar dari garis kemiskinan	Analisis Mandiri	Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten serta HIMBARA	Kasi Jaminan Sosial

	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	Mengidentifikasi Kelompok usaha Bersama baik di Desa/Kelurahan yang berpotensi untuk membantu meningkatkan pendapatan anggotanya setelah diberikan bantuan KUBE	Semakin banyak jumlah KUBE yang mampu berkembang, maka dapat mengurangi angka kemiskinan	Jumlah KUBE yang mampu berkembang/usaha nya tetap eksis	Analisis Mandiri	Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten	Kasi Jaminan Sosial
		Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan	Mengidentifikasi jumlah penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang tidak terjerumus ke garis kemiskinan	Semakin banyak RUTILAHU yang direhab, maka dapat meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin	Jumlah RUTILAHU yang di rehab	Analisis Mandiri	Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten	Kasi Jaminan Sosial
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>								
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	Seluruh korban bencana baik alam maupun sosial dalam hal kebutuhan pokok atau orgen dilokasi	korban bencana alam adalah prioritas dalam masa tanggap darurat	Korban bencana : jumlah seluruh korban bencana	Data dilapangan	Kader sosial/ Anggota tagana	Kabid Perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan bencana
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Mengidentifikasi jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan	Karena mereka adalah korban dari bencana tersebut	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar setelah mendapatkan bantuan			Kasi Perlindungan Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang						
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan yang dibangun						
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah keluarga rentan yang dilayani						
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Keluarga yang mendapatkan dukungan psikososial						
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif						
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga yang dibentuk						
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	Tagana yang diberikan pelatihan keterampilan mengenai bencana	Semakin Sigap dan solid terhadap Kesiapan Anggota Tagana dalam penanganan bencana	Jumlah taruna siaga bencana yang terampil dalam menangani bencana		Dinas Sosial Balangan	Kasi Penanganan Bencana
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>								
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	Mengindikasikan jumlah makam pahlawan yang terawat	Teridentifikasinya jumlah makam pahlawan yang terawat	Jumlah makam pahlawan yang terawat	Analisis mandiri	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Kabid Permbudayaan dan Rehabilitasi Sosial
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan yang direhabilitasi						
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Mengindikasikan jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Teridentifikasinya jumlah makam pahlawan yang terpelihara	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Analisis mandiri	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Pendampingan dan Supervisi	Kasi Pendampingan dan Supervisi
<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>								
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah lembaga pemerintah yang paham dan terlatih menunjukan besarnya peran lembaga pemerintah dalam pelaksanaan PUG di daerah	Tersusunnya anggaran yang responsif gender pada semua lembaga pemerintah di Daerah dapat meningkatkan percepatan PUG melalui PPRG	Jumlah SKPD Kabupaten yang menyusun ARG	PMDN 18 / 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	Kabid PPPA	

	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Peserta rapat koordinasi merupakan bagian dari tim kelompok kerja dan tim driver PUG maupun orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PUG di setiap perangkat daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi setiap program dan kegiatan yang ada di perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG di Kabupaten	Analisis mandiri	Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	Peningkatan jumlah SDM perencana yang terampil dalam Penyusunan ARG termasuk PPRG	SDM perencana yang terampil tentang PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah	Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Bersama lembaga layanan pemberdayaan perempuan dapat bersinergi dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Jumlah lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten dalam 1 tahun	analisis mandiri	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi yang memahami tentang kesetaraan dan keadilan gender	Tersosialisasinya pemahaman isu tentang gender dan anak kepada perwakilan2 perempuan, diharapkan akan memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan yang responsif gener dan anak serta mampu menyuarakan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap kebijakan pembangunan	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Analisis mandiri	Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam politik, hukum sosial dan ekonomi	Terlatihnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan Perempuan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan yang mengikuti pelatihan	Analisis mandiri	Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan
		Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	Peningkatan partisipasi perempuan dalam penyaluran bantuan spesifik	Tercapainya penyaluran bantuan spesifik yang tepat sasaran dengan tujuan memahami kesetaraan gender	Jumlah paket bantuan spesifik yang didistribusikan	Analisis mandiri	Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan
		Jumlah penyaluran Bakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	Peningkatan partisipasi perempuan dalam penyaluran bantuan bakti sosial	Tercapainya penyaluran bakti sosial yang tepat sasaran dengan tujuan memahami kesetaraan gender	Jumlah paket bantuan bakti sosial yang didistribusikan	Analisis mandiri	Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>								
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	semakin banyak desa yang dilakukan sosialisasi harapannya semakin menurun kekerasan terhadap perempuan	untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah desa yang dilakukan sosialisasi dalam satu tahun	analisis mandiri	Bidang PPPA	Kabid PPPA

	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Masyarakat yang dilatih dalam perlindungan perempuan	Masyarakat memiliki peran sebagai mitra dalam perlindungan terhadap perempuan, sehingga mendidik masyarakat untuk mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap perempuan akan mempermudah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan	Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan , Undang - Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan
	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan						
	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Lembaga Layanan korban kekerasan sesuai dengan standar minimal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di kabupaten Balangan	standar pelayanan minimal sangat diperlukan untuk kenyamanan korban kekerasan	Lembaga layanan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Balangan	Permen PPPA Nomor 1 tahun 2010	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	Menunjukan keaktifan petugas Kabupaten/Kota dalam melaporkan kegiatan pencegahan dan penanganan indikator	Penting untuk bahan pengambilan keputusan dalam pencegahan dan penanganan TPPO	Jumlah korban perempuan yang terlayani dibagi jumlah seluruh korban yang melapor kali 100%	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Seksi Perlindungan, PUG dan Pemberdayaan Perempuan
<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>								
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Keluarga (Rata-rata)	5 dimensi ketahanan keluarga yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya	Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin	hasil rata - rata perhitungan pengukuran indeks ketahanan keluarga dari 8 type keluarga	(hasil dari indeks ketahanan keluarga berdasarkan data entry)	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pembinaan desa	Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga	Pembinaan terhadap desa lokus TPK2D merupakan pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	Jumlah pembinaan yang dilakukan pada desa lokus binaan TPK2D	Permen PPPA No 6 /2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga	Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak



		Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	Pelatihan keterampilan adalah sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga seseorang/kelompok orang belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu	indikator ini menggambarkan seberapa besar keikutsertaan perempuan pada pelatihan keterampilan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas keluarga	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan pada desa lokus binaan TPK2D	PermenPPPA No 6 /2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga	Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dengan pengisian survey kepuasan terhadap masyarakat yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA	untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PUSPAGA	Total nilai persepsi perunsur dibagi total nilai yang terisi kali nilai tertimbang	analisis statistik	Bidang PPPA	Kabid PPPA
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Pernikahan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 tahun. Penyuluhan pencegahan perkawinan usia anak merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah terjadinya perkawinan usia anak	Indikator ini menggambarkan seberapa besar keikutsertaan masyarakat pada kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia anak	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan pencegahan perkawinan usia anak		UU No 35/2014 tentang perlindungan anak dan UU No 16/2019 tentang batas minimal usia perkawinan	Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	2. Jumlah klien pada PUSPAGA yang terlayani	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan wadah keluarga untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan keluarga dalam mengasuh anak khususnya mendukung tumbuh kembang anak, menjadi pasangan orang tua yang harmonis, mencegah terjadinya permasalahan dalam keluarga, yang dapat diwujudkan secara mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat dengan rasa aman, menyenangkan dan gratis.	Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas dan kuantitas pelayanan PUSPAGA	Jumlah klien yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan di PUSPAGA		UU No 35/2014 tentang perlindungan anak dan UU No 16/2019 tentang batas minimal usia perkawinan	Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
<b>Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>								
Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	Dokumen data yang disusun dan divalidasi adalah dokumen data gender dan anak serta dokumen data pelaporan e kekerasan simfoni PPA	indikator ini menggambarkan ketersediaan data gender dan anak dan data pelaporan kekerasan perempuan dan anak	Jumlah Dokumen data gender dan anak serta dokumen data pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang telah disusun dan divalidasi		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang PERLINDUNGAN ANAK dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Bidang PPPA	Kepala Bidang PPPA
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.	indikator ini menggambarkan ketersediaan data gender dan anak yang telah dihimpun dan disusun	Jumlah tabel data gender dan anak yang telah dihimpun dan disusun		Permen PPPA No 6/2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak	Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik	Data terpilah gender dan anak adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status, kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial budaya, dan kekerasan. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 tahun (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun	indikator ini menggambarkan ketersediaan data gender dan anak yang telah dapat dijadikan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah	Jumlah dokumen data gender dan anak yang telah tersaji	Permen PPPA No 6/2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak	Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak baik di tingkat nasional, provinsi, dan Kab/Kota secara up to date, riil time dan akurat, untuk menuju SATU DATA, DATA KEKERASAN NASIONAL.	indikator ini menggambarkan ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak	Jumlah dokumen data kekerasan perempuan dan anak yang telah tersaji	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang PERLINDUNGAN ANAK dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
<b>Pemenuhan Hak Anak</b>								
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase Desa Layak Anak	Desa Layak anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi	Sebagai indikator pencapaian KLA	Jumlah desa Layak anak yang sudah dibentuk dibagi Jumlah seluruh Desa kali 100%	Analisis mandiri	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.	Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak Anak oleh seluruh Anggota GT supaya bisa diterapkan dalam mengembangkan kebijakan;menentukan fokus program; dan menyusun kegiatan prioritas dalam pengembangan KLA.	Jumlah Anggota GT KLA yang hadir dalam Rapat GT KLA	Permen PPPA no 13 tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Seksi PHA dan PKA	Kepala seksi PHA dan PKA
	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	1. jumlah sekolah yang ramah anak						
		2. jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak						
		3. jumlah mesjid yang memenuhi kriteria ramah anak						
		4. jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak						

	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	untuk mengetahui peningkatan jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak setiap tahun	sebagai indikator pencapaian KLA	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terbentuk dibagi target lembaga penyedia layanan yang akan dibentuk kali 100%	Permen PPPA no 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten Layak Anak	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kader Posyandu, Lembaga dan Masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak						
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	Jumlah Forum anak Desa yang dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan anak - anak di desa sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup anak di desa	Sebagai salah satu Indikator penilaian Kabupaten layak Anak klaster hak sipil dan kebebasan	Jumlah Forum anak yg berhasil dibentuk di tingkat desa selama satu tahun oleh Dinas	Permen PPPA no 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten Layak Anak	Seksi PHA dan PKA	Kepala seksi PHA dan PKA
	Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	Pendataan profil anak berisi data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;	Sebagai salah satu Indikator penilaian Kabupaten layak Anak bagian penguatan kelembagaan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak yang dilaksan kn dalam satu Tahun	Permen PPPA no 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten Layak Anak	Seksi PHA dan PKA	Kepala seksi PHA dan PKA
		Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam pengembangan Puskesmas Ramah Anak dalam Satu tahun	Sebagai salah satu Indikator penilaian Kabupaten layak Anak Klaster Kesehatan dasar dan Kesejahteraan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang hadir dalam pelatihan PRA	Permen PPPA no 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten Layak Anak	Seksi PHA dan PKA	Kepala seksi PHA dan PKA
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Jumlah Ruang Laktasi	Ruang Laktasi / Pojok ASI dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI.	Sebagai salah satu Indikator penilaian Kabupaten layak Anak Klaster Kesehatan dasar dan Kesejahteraan	Pojok ASI / ruang laktasi yang disediakan di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya dan jumlah meningkat tiap tahun.	Permen PPPA no 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten Layak Anak	Seksi PHA dan PKA	Kepala seksi PHA dan PKA
		Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak	Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakkn berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas ha-hak anak sesuai 4 prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.	Sebagai salah satu Indikator penilaian Kabupaten layak Anak Klaster Kesehatan dasar dan Kesejahteraan	Puskesmas yang memenuhi Indikator Puskesmas Ramah Anak	UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 21)	Seksi PHA dan PKA	Kepala seksi PHA dan PKA
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>								
	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	semakin banyak sekolah yang dilakukan sosialisasi harapannya semakin menurun kekerasan terhadap anak	untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi dalam satu tahun	analisis mandiri	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	Sosialisasi advokasi / kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, tujuannya anak memahami dan mengetahui mengenai hal-hal yang termasuk dalam kekerasan terhadap anak dan bisa menjauhinya.	Semakin banyak anak -anak yang mengetahui/tahu tentang pencegahan kekkerasan terhadap anak akan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak atau semakin banyak anak yang menjadi korban dan dapat tertangani.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Seksi PHA dan PKA	Kepala seksi PHA dan PKA

	Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk pengawasan perlindungan anak dari KPAI, rakor dalam pembuatan Mou dengan instansi vertikal						
	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dengan pengisian survey kepuasan terhadap masyarakat yang melapor ke DSPPPAPMD	untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DSPPPAPMD	Total nilai persepsi perunsur dibagi total nilai yang terisi kali nilai tertimbang	analisis statistik	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	Korban anak yang terlayani yaitu pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, eksploitasi maupun penelantaran yang melapor ke dinas dan dilayani/ditangani oleh dinasesuai dengan kebutuhannya.	Sebagai salah satu Indikator penilaian Kabupaten layak Anak klaster perlindungan khusus	Jumlah seluruh korban anak yang terlayani dibagi jumlah korban anak yang melapor kali 100 %	UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Seksi PHA dan PKA	Kepala seksi PHA dan PKA
	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus						
	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah KIE yang dicetak / dibuat						
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan / kota	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga Layanan korban kekerasan sesuai dengan standar minimal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di kabupaten Balangan	standar pelayanan minimal sangat diperlukan untuk kenyamanan korban kekerasan	Lembaga layanan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Balangan	Permen PPPA Nomor 1 tahun 2010	Bidang PPPA	Kabid PPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	Kader dan fasilitator PATBM Desa adalah kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak (baik pencegahan maupun penanganan)	Sebagai salah satu Indikator penilaian Kabupaten layak Anak bagian penguatan kelembagaan, yaitu peran serta lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kader PATBM baik yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi maupun Pusat	UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Seksi PHA dan PKA	Kepala seksi PHA dan PKA
	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus Tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus						
Program Peningkatan Kerjasama Desa								



	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang di buat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, kerjasama desa menjadi bagian dari upaya meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa	Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat	Jumlah desa yang melakukan kerjasama di bagi jumlah desa SeKabupaten Balangan	Permendagri Nomor 96 Tahun 2017	rapat dan monitoring evaluasi	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi						
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi	Kerjasama desa merupakan bagian dari upaya peningkatan pembangunan dan perekonomian desa	Kerjasama desa merupakan salah satu faktor dalam rangka peningkatan pembangunan dan perekonomian desa	Jumlah desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di bagi Jumlah target desa yang di fasilitasi	Permendagri Nomor 96 Tahun 2017	rapat dan monitoring evaluasi	seksi pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi						
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>								
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	APBDes merupakan dokumen rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa	Indikator ini menggambarkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	=Jumlah Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu/Jumlah Desa x 100%	1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 2. Perbup Balangan Nomor 48 Tahun 2018	Bidang Administrasi Pemeritahan dan Penataan Desa	Kepala Dinas
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	Jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar aparatur desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan	Indikator ini menggambarkan kepala desa dan dan perangkatnya beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program JKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur desa yang terfasilitasi / jumlah seluruh aparatur desa x 100%	PMDN 119/2019	Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa	Kepala Dinas
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Daftar usulan RKPDes adalah penjabaran RPJMDes yang menjadi bagian dari RKPDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah	Dalam indikator ini digambarkan bagaimana desa di dalam menyusun RKPDes sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	PMD, PDTT 21 / 2020	Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa	Kepala Dinas
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	APBDes merupakan dokumen rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa	Indikator ini menggambarkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	=Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu/Jumlah Desa x 100%	1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 2. Perbup Balangan Nomor 48 Tahun 2018	Bidang Administrasi Pemeritahan dan Penataan Desa	Kepala Dinas
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Kabupaten						
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah BUMDes yang berkembang						

	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak	Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan secara bergelombang dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan ASN untuk pengisian Pejabat kepala desa serta dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam 6 tahun	Indikator ini menggambarkan terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa agar menghasilkan kepala desa yang berkualitas	Jumlah kepala Desa yang berakhir masa jabatannya	PMDN 112 / 2014	Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa	Kepala Dinas
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terwujudnya Database Perangkat Desa Se- Kabupaten Balangan						
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa yang mengisi Prodeskel dan Evdeskel						
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	Inventarisasi aset desa merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.	Indikator ini menggambarkan pengelolaan aset desa dilakukan tepat waktu dan tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	=Jumlah Desa yang menyampaikan laporan inventarisasi aset desa tepat waktu/Jumlah Desa x 100%	1. Pemendagri Nomor 1 Tahun 2016 2. Perbup Balangan Nomor 23 Tahun 2018	Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa	Kepala Dinas
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Penyampaian Laporan Kinerja BPD tepat Waktu						
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang selesai Penetapan Batas Desa	Batas desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam punggung gunung/ pegunungan, median sungai yang dituangkan dalam bentuk peta	Indikator ini menggambarkan penetapan dan penegasan batas desa adalah bertujuan untuk menciftakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis	Jumlah desa yang selesai menetapkan dan menegaskan batas desa	PMDN 45 / 2016	Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa	Kepala Dinas
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang						
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat								
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	BUMDES aktif adalah Bumdes yang memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan tertata serta menghasilkan PAD	Agar dapat di ukur tingkat keberhasilan terhadap pembinaan BUMDES	BUMDES aktif dibagi Bumdes yang di bina x 100%		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	Jumlah KPM yang terampil	Peningkatan jumlah KPM terampil dalam memberdayakan masyarakat sekaligus membantu dalam penyusunan kebijakan desa	Jumlah kelompok binaan LPM dibagi 100% jumlah LPM		Seksi Kelengkapan Masyarakat dan Adat	Kasi Kelembagaan Masyarakat dan Adat
		Jumlah Kader Posyandu yang terampil	Jumlah Kader Posyandu yang terampil	Peningkatan jumlah kader posyandu terampil dalam pemenuhan layanan sosial	Jumlah Kader Posyandu terampil dibagi 100% jumlah Kader Posyandu		Seksi Kelengkapan Masyarakat dan Adat	Kasi Kelembagaan Masyarakat dan Adat
		Jumlah LPM dibina	LPM adalah organisasi masyarakat yang bertugas membantu aparat desa dalam membrdayakan masyarakat sekaligus membantu dalam penyusunan kebijakan desa	LPM Merupakan satu organisasi masyarakat yang penting dalam membangun desa	Jumlah kelompok binaan LPM dibagi 100% jumlah LPM		Seksi Kelengkapan Masyarakat dan Adat	Kasi Kelembagaan Masyarakat dan Adat
		Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	Kader PKK Desa yang dibina	Pemberdayaan masyarakat yang mendasar dilihat dan kesejahteraan keluarga	Kader PKK Desa dibina x 100% Jumlah Kader PKK Desa		Seksi Kelengkapan Masyarakat dan Adat	Kasi Kelembagaan Masyarakat dan Adat

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan Bumdes.	Tersusunnya laporan pengelolaan administrasi pengelolaan Bumdes yang tertib dan transparan.	Jumlah laporan hasil monitoring pengelolaan BUMDES		Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	Terbentuknya Posyantek sebagai wadah dalam kegiatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Desa	Dengan terbentuknya Posyantek, Desa mempunyai lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi tentang Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek Desa terbentuk dibagi 100% jumlah Desa		Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
		umlah KP-Spams di desa	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan sarana dan penyediaan air minum berbasis masyarakat pedesaan	Dengan menargetkan desa sasaran lokasi pamsimas untuk penyediaan air minum aman dikonsumsi masyarakat dari pada air minum sungai mengalir kepersawahan	Jumlah KP-SPAMS Pedesaan dibagi 100% jumlah desa		Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
		umlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi	Menumbuhkan kreasi dan swadaya masyarakat dalam memasyarakatkan karya cipta teknologi tepat guna	Pemanfaatan potensi local sumber daya alam dengan teknologi tepat guna berinovasi sesuai kebutuhan masyarakat pedesaan	Jumlah karya cipta inovasi dan teknologi pedesaan dibagi 100% jumlah desa		Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat						
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	Pemberdayaan masyarakat yang mendasar dilihat dan kesejahteraan keluarga	PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan Aktif x 100% Jumlah PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan		Seksi Kelengkapan Masyarakat dan Adat	Kasi Kelengkapan Masyarakat dan Adat